

DAFTAR PUSTAKA

- Wasistono, S., & Riyani, O. (2003). *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Fokusmedia. Cet. Ke-2. Bandung (2003)
- Abdurrahman, M., & Muhibin, S. A. (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Silalahi, U., *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Sinar Baru, Bandung , 1992.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Alumi
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika
- Indaryanto, W. (2013). *Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Keterlibatan Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*. Dari Redaksi, 231
- Ali Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan proses legislatif indonesia*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 1995
- Tharsya Rieskyana, *Sampah Organik dan Non-Organik*. (Bandung, CV. Teman Belajar 2011).
- Iqbal, M. (2016). *Fiqih Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Ali Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan proses legislatif indonesia*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 1995
- Fitriyani, G. (2019). Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (study di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Rian Andrianto “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (study di Pekon Purajaya Kecamatan kebun Tebu kabupaten Lampung Barat).” *Skripsi*, fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
- Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis. “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (study Kasus di Sapang dan Jombang, Kota Semarang), Universitas Diponegoro, 2008.
- Liky Faizal, “Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah”, jurnal TAPIs, vol. 7, hlm 6.

Risma Dwi Arisona, “Pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) pada pembelajaran ips untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan”, Al Ulya Vol, 3 No. 1.

Ratna Arisandi, Hery Nariyah, Nursahidin, “implementasi kebijakan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kabupaten cirebon”, Jurnal Publika, Vol. 7, No. 2

Bintang, H. L & Jamaan, A (2013), “Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda”. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Hal. 57-64.

Haryati, D. (2016), Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kajian, 15 (3), 523-550.

Arisandi, R. Nariyah, H & Nursahidin, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Study Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru). *Jurnal Ilmiah Publika*, 7 (2)

Risma Dwi Arisona, pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) pada pembelajaran ips untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan, Al Ulya Vol, 3 No. 1

Agus. R.N., oktaviyanthi, R., & Sholahudi, U. (2019). 3R, suatu alternatif pengolahan sampah rumah tangga. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 72-77

Hukum online, Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/?page=2> (diakses pada tanggal 1 April 2023).

DPRD Banjarnegara, http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109 (diakses pada tanggal 5 desember 2022).

Detik.com, <http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5705800/lembaga-legislatif--pengertian-contoh-dan-tugasnya> (diakses pada tanggal 7 desember 2022)

Peran pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai, djk.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 7 desember 2022)

<http://klc2.kemenkeu.go.id>detail> Peran pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai, djk.kemenkeu.go.id (diakses pada tanggal 11 februari 2023)

Sekretariat jenderal DPRD “Penyusunan Produk Hukum Daerah Harus Sesuai Peraturan Perundang-Undangan”. <https://www.dpr.go.id> (diakses pada tanggal 16 februari 2023)

DPRD Banjarnegara, http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109 (diakses pada tanggal 5 desember 2022)

DPRD Banjarnegara, https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109 (diakses pada tanggal 4 November 2022)

Sudut hukum (Pengertian Siyasah Dusturiyyah, 2017)

<https://suduthukum.com/2017/04/siyasah-dusturiyah.html> (diakses pada 11 Maret 2023)

Letak Geografis DPRD Kabupaten Cirebon, <http://dprd-cirebonkab.go.id/selang-pandang/letak-geografis/> (diakses pada tanggal 17 maret 2023)

Alat Kelengkapan dprd, <http://dprd-cirebonkab.go.id/alat-kelengkapan-dprd/pimpinan-dprd/> (diakses pada tanggal 18 maret 2023)

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 149

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perda No. 5 Tahun 2022 Pasal 12 ayat 4

Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 13

Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 14 ayat (2)

Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 16 ayat (1)

Wawancara, H. Sofwan, ST. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon